



► KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

7 Kapanewon Jadi Fokus Pengentasan Kemiskinan

WONOSARI—Tujuh kapanewon di Kabupaten Gunungkidul menjadi fokus penanganan kemiskinan di tahun ini. Pemkab telah mengalokasikan anggaran Rp217,1 miliar untuk menekan angka kemiskinan di Bumi Handayani.

David Kurniawan
david@harianjogja.com

Tujuh kapanewon yang menjadi fokus pengentasan kemiskinan meliputi Gedangsari, Semin, Saptosari, Playen, Ponjong, Tepus, dan Rongkop.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Gunungkidul, Mohammad Arif Aldian, mengatakan tujuh kapanewon mendapat perhatian utama dalam penanganan kemiskinan berdasarkan hasil kajian dari Pemda DIY. Penetapan fokus mengacu pada sejumlah indikator seperti jumlah penduduk miskin di kapanewon tersebut, nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM), nilai Indeks Desa Membangun hingga Kalurahan Rawan Pangan.

Selain itu, juga ada indikator tentang banyaknya rumah tak layak huni (RTLH), jumlah sanitasi tidak layak, jumlah akses sumber air tidak layak hingga akses kelistrikan. "Hasil kajian

► Pemkab Gunungkidul telah mematok target penurunan angka kemiskinan sebesar 0,34%.

► Pemkab Gunungkidul telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp217,1 miliar untuk penanggulangan kemiskinan di tahun ini.

menetapkan tujuh kapanewon di Gunungkidul yang menjadi fokus penanganan kemiskinan di 2025," kata Aldian, Minggu (22/6).

Dia menjelaskan Pemkab Gunungkidul telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp217,1 miliar untuk penanggulangan kemiskinan di tahun ini. Total ada 51 program dan 148 sub kegiatan penanganan kemiskinan yang tersebar di 20 organisasi perangkat daerah (OPD).

"Program-program ini tertuang dalam Rencana Aksi Tahunan [RAT] Penanggulangan Kemiskinan. Untuk optimalisasi dalam penanggulangan maka penanganan harus dilakukan secara lintas sektor," kata Aldian.

Menurut dia, ada beberapa program prioritas untuk penanggulangan kemiskinan seperti pembangunan jamban sehat dan *septic tank* aman, bantuan rumah tidak layak huni (RTLH), instalasi air minum bagi keluarga

miskin. Selain itu, juga ada subsidi iuran BPJS bagi masyarakat tidak mampu, bantuan sosial permakanan, hingga beasiswa dan pelatihan kerja bagi UMKM dan pencari kerja.

"Upaya memerangi kemiskinan harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Pemkab Gunungkidul berkomitmen untuk terus mengurangi jumlah warga miskin," katanya.

Menurut dia, upaya memerangi angka kemiskinan terus dilakukan. Di tahun ini, Pemkab Gunungkidul telah mematok target penurunan angka kemiskinan sebesar 0,34%.

"Harapannya saat dilakukan penghitungan, kemiskinan bisa turun di angka 14,84%," ungkapnya.

Ketua DPRD Gunungkidul, Endang Sri Sumiyartini, mengatakan berdasarkan Laporan Kerja Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD 2024, angka kemiskinan di Bumi Handayani turun 0,42%. Di 2023, jumlah keluarga miskin di Gunungkidul mencapai 15,6%, tapi tahun lalu berkurang menjadi 15,18%.

"Mudah-mudahan jumlah keluarga miskin di Gunungkidul bisa terus diturunkan," kata Endang.

Meski demikian, ia berharap penurunan angka kemiskinan bisa lebih dioptimalkan. Guna mewujudkannya, program dan kebijakan dari Pemkab difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.